

# **STUDI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERPERSPEKTIF GENDER DI SULAWESI TENGAH**

**Trinirmalaningrum<sup>1</sup>**, Lien Sururoh, Nur Reihan Lubis  
Yayasan Skala Indonesia Jl. Boulevard blok RBOE 12 Cikeas Bogor  
<sup>1</sup>riniskala@gmail.com / yayasanskalaIndonesia@gmail.com

## **Abstrak**

Gempa Palu, Donggala, Sigi dan Parigi-Moutong (Padagimo) terjadi pada Jumat sore, 28 September 2018 dengan magnitudo Mw 7,4, berpusat di 26 km utara Donggala, Sulawesi Tengah. Bencana ini menyebabkan berbagai macam persoalan dari mulai kesejahteraan hingga kekerasan berbasis gender. Gender menjadi faktor penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kajian pengurangan risiko bencana dengan lensa gender diperlukan untuk memperkuat strategi ketahanan serta mitigasi masyarakat yang berperspektif gender. Kajian risiko bencana dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis Perka No. 2 Tahun 2012 dikombinasikan dengan perangkat penilaian desa tangguh bencana untuk menilai kapasitas serta Perka No.13 Tahun 2014 untuk melihat perspektif gender dalam penanggulangan bencana. Didapatkan hasil risiko bencana Desa Tompe bernilai tinggi, risiko bencana Desa Tanjung Padang bernilai tinggi, Risiko bencana di Desa Mataue bernilai tinggi, Risiko bencana Desa Lonca bernilai sedang, Kelurahan Balaroa ini memiliki risiko bencana yang tinggi. Penanggulangan bencana yang responsif gender akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi nilai kapasitas suatu desa, semakin besar pula keterlibatan perempuan dalam penanggulangan bencana

Kata kunci: Risiko Bencana, Gender, Sulawesi Tengah

## **Abstract**

The Palu, Donggala, Sigi and Parigi-Moutong (Padagimo) earthquakes occurred on Friday afternoon, September 28, 2018 with a magnitude of Mw 7.4, centered 26 km north of Donggala, Central Sulawesi. This disaster caused a variety of problems ranging from welfare to gender-based violence. Gender is an important factor in disaster risk reduction efforts. Disaster risk reduction studies with a gender perspective are needed to strengthen community resilience and mitigation strategies that have a gender perspective. The hazard assessment is carried out using the analytical tool of Perka No. 2 of 2012 combined with a disaster assessment tool to assess capacity and Perka No. 13 of 2014 to see a gender perspective in disaster management. Results showed the disaster risk in Tompe Village is high, Tanjung Village disaster risk is high, Mataue Village is high, Lonca Village is moderate, Balaroa Village has a high disaster risk. Gender responsive disaster management will strengthen community capacity. The higher the value of a village, the greater the involvement of women in disaster management

Keywords: Disaster Risk, Gender, Central Sulawesi

## PENDAHULUAN

Sulawesi merupakan wilayah pertengahan tiga lempeng, Indo-Australia, Eurasia, dan Filipina. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah ini sangat rawan terhadap bencana gempa bumi tektonik. Tekanan akibat pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan banyak sesar aktif lokal di wilayah Sulawesi. Salah satu sesar aktif di Sulawesi adalah sesar Palu-Koro yang memanjang kurang lebih 250 km dari utara (Kota Palu) ke selatan (Malili) hingga Teluk Bone. Gempa Palu, Donggala, Sigi dan Parigi-Moutong (Padagimo) terjadi pada Jumat sore, 28 September 2018, pukul 18:02:44 WITA dengan magnitudo Mw 7,4, berpusat di 26 km utara Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa ini menyebabkan guncangan yang kuat dan menimbulkan tsunami yang melanda Kota Palu dan pesisir pantai Kab. Donggala, serta mengakibatkan likue-faksi besar-besaran terutama di daerah Petobo dan Balaroa di Kota Palu.

Persoalan kesejahteraan sosial merupakan masalah utama pasca bencana yang dinilai belum ditangani optimal oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Setumpuk pekerjaan rumah itu di antaranya mengenai realisasi pencairan dana jaminan hidup (jadup). Saat ini tercatat ada 172.999 jiwa yang terdaftar sebagai pengungsi baik itu di hunian sementara (huntara), maupun yang masih bertahan di pengungsian. Dari angka tersebut, baru 64.840 jiwa yang terdaftar untuk menerima jadup. Di antaranya, 15 ribu jiwa di Sigi dan 7

ribu jiwa di Palu yang sudah menerima dana ini.

Gender menjadi faktor penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Gender sangat erat kaitannya dengan tindakan, pemikiran dan pengambilan keputusan. Perbedaan yang beragam dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana menjadi sangat dinamis jika semua pihak dilibatkan. Hal ini dilakukan guna memahami pilihan-pilihan mata pencaharian yang berbeda di masyarakat serta strategi-strategi mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihan tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan pasca bencana. Ketimpangan akses mengakibatkan perempuan lebih rentan menjadi korban dalam kejadian bencana.

Berapa kasus pengambilan keputusan masih banyak mengesampingkan isu-isu gender. Padahal, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Perempuan mengambil andil yang sangat penting dalam praktek penanggulangan dan mitigasi bencana. Bencana alam mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, bahkan terjadi dalam banyak konteks, karena kondisi sosial-ekonomi serta kepercayaan budaya dan praktik tradisional, perempuan dan anak perempuan lebih mungkin terkena dampak bencana secara tidak proporsional, termasuk hilangnya nyawa selama dan setelah bencana, hilangnya mata pencaharian dan aset produktif, dan peningkatan kekerasan berbasis gender.

Mengantisipasi, merencanakan dan mengurangi risiko bencana sangat mendesak dan penting untuk dilakukan demi melindungi kesejahteraan, kesehatan, warisan budaya, aset sosial ekonomi dan ekosistem pada level manusia, komunitas dan negara secara lebih efektif, juga memperkuat ketangguhan pada setiap tingkatan. Berdasarkan hal-hal inilah, studi ini penting dilakukan, mengingat Sulawesi Tengah berada di jalur sesar Palu-Koro yang merupakan salah satu sesar yang paling aktif di dunia.

Hidup di wilayah dengan potensi ancaman bencana seperti gempa bencana alam lainnya mengharuskan peningkatan kapasitas ketangguhan penduduk, dan juga pemerintahannya. Perubahan paradigma dari penanganan darurat menuju pengurangan risiko bencana sesungguhnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat menjadi pelaku utama dalam membangun komunitas yang tangguh bencana.

## **TUJUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko bencana dan pengarusutamaan gender dalam penanganan bencana untuk memperkuat strategi ketahanan serta mitigasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Studi Penilaian yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada analisis pendekatan pengurangan risiko bencana (PRB) di beberapa wilayah yang diteliti. Studi Ini melibatkan peninjauan dan analisis kebijakan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, termasuk perencanaan tata

ruang, kebijakan pemerintah yang relevan dan juga kebiasaan setempat dan kearifan lokal.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tompe dan Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala, Desa Mataue dan Lonca Kec. Kulawi Kab. Sigi dan Kelurahan Balaroa di Kota Palu sejak bulan Februari hingga Mei 2020, pengumpulan data di lapangan dilakukan pada 16-26 Februari 2020. Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya: *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus), wawancara tokoh kunci, survei dan studi literatur terdahulu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat analisis Perka No. 2 Tahun 2012 untuk mengkaji kerentanan, mengkombinasikan dengan Perka No.2 Tahun 2012 dan perangkat penilaian desa tangguh bencana untuk menilai kapasitas, serta Perka No.13 Tahun 2014 untuk melihat perspektif gender dalam penanggulangan bencana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Potensi bencana di wilayah yang diteliti menunjukkan hasil yang bervariasi berdasarkan pada sejarah bencana yang pernah terjadi di masing-masing daerah penelitian. Berdasarkan data Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, pada tahun 2015-2020, menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki potensi bencana gempa, tsunami, tanah bergerak dan cuaca ekstrem, kajian ini berdasarkan sejarah

bencana yang pernah terjadi di masa lalu.

Dari data Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi 2015-2020, menunjukkan bahwa potensi bencana banjir cukup tinggi di wilayah Sigi. Banjir merupakan kejadian yang terjadi hanya satu kali, begitu juga dengan gempa, tsunami dan likuefaksi hanya terjadi satu kali. Tetapi walau kelas bahayanya sama-sama tinggi, gempa memiliki daya rusak yang lebih besar.

Data Kajian Risiko Bencana (KRB) Kab. Donggala menunjukkan tentang

luasan wilayah dengan kelas bahaya tinggi, sedang dan rendah, serta luasan wilayah yang terpapar akan bencana. Berdasarkan data tersebut bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, keke-ringan, tanah longsor, gempabumi dan tsunami berada di kelas bahaya tinggi. Terbukti dari kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah bahwa wilayah Kab. Donggala sering sekali dilanda tsunami dalam kurun waktu 100 tahun terakhir saja sudah terjadi gempa dan tsunami 4 kali yaitu pada tahun 1927, 1938, 1968 dan 2018.

Tabel 1. Tabel Kajian Kerentanan dan Kapasitas (*vulnerability capacity analysis*)

| No | Wilayah             | Kerentanan Fisik | Kerentanan Sosial | Kerentanan Ekonomi | Ketangguhan | VCA    |
|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------|
| 1. | Kelurahan Balaroa   | 3                | 2,5               | 2                  | 55          | Tinggi |
| 2. | Desa Tompe          | 2,7              | 2,4               | 2,6                | 77          | Tinggi |
| 3. | Desa Tanjung Padang | 2,1              | 1,8               | 2,6                | 66          | Sedang |
| 4. | Desa Mataue         | 1,8              | 1,1               | 2,6                | 68          | Sedang |
| 5. | Desa Lonca          | 2,1              | 1,2               | 2,6                | 89          | Rendah |

Kajian kerentanan dilakukan pada lima wilayah yang diteliti yaitu Desa Tompe dan Tanjung Padang di Kab. Donggala, Desa Mataue dan Lonca di Kab. Sigi serta Kelurahan Balaroa di Kota Palu.

Desa Tompe memiliki hasil kajian kerentanan sebesar 2,57 menandakan bahwa desa ini memiliki kerentanan yang tinggi. Kerentanan sosial Desa Tompe masuk ke dalam kategori

sedang. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial yang ada di desa ini tidak terlalu banyak, yang perlu diperhatikan adalah kemiskinan yang cukup tinggi karena berkurangnya pendapatan pasca gempa.

Kerentanan ekonomi Desa Tompe masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakatnya memiliki matapencaharian sebagai nelayan,

petani dan pedagang hasil laut. Pencari nafkah utama adalah kepala keluarga, sementara perempuan di desa ini hanya membantu suaminya menjual hasil tangkapan ikan atau menjajakan produk pangan lainnya.

Kerentanan fisik Desa Tompe termasuk ke dalam kategori tinggi. Banyak bangunan yang hancur akibat gempa. Hunian sementara yang tidak responsif gender mengakibatkan bebe-rapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual

Desa Tompe memiliki nilai ketang-guhan 77 yang masuk dalam kapasitas bernilai sedang yang masuk ke dalam kategori desa Tangguh Bencana Madya. Ketangguhan kualitas dan akses layanan dasar memperoleh nilai 33, menandakan bahwa fasilitas layanan dasar sudah tersedia dengan baik

Desa Tompe sudah melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan inisiatif berdialog bersama tetangga desanya untuk menjadi desa penyang-ga. Kapasitas pengetahuan masyarakat mengenai potensi bencana masih rendah, namun setelah gempa banyak intervensi dari LSM untuk meningkat-kan pengetahuan mereka.

Kesiapsiagaan masyarakat sudah mulai dibangun, hal ini dibuktikan bahwa desa memiliki mekanisme sistem peringatan dini tersendiri dengan melibatkan aparat desa.

Nilai risiko bencana Desa Tompe bernilai tinggi. Nilai risiko bencana yang tinggi diakibatkan karena keren-tanan ekonomi yang sangat tinggi dan akses layanan dasar yang belum sensitif gender.

Desa Tanjung Padang memiliki total nilai kerentanan sebesar 2,21 yang dapat dimasukkan ke dalam

kategori kerentanan sedang. Kerentanan sosial Desa Tanjung Padang dikategorikan sedang. Masalah kemiskinan akibat rusaknya alat produksi untuk mencari ikan menjadi permasalahan utama khususnya bagi para perempuan yang kesulitan dalam akses bantuan.

Kerentanan ekonomi Desa Tanjung Padang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan. Sama seperti Desa Tompe, perempuan di desa ini hanya membantu suaminya menjual hasil tangkapan ikan atau produk pangan lainnya.

Kerentanan Fisik Desa Tanjung Padang termasuk ke dalam kategori sedang dikarenakan tidak banyak fasilitas umum dibangun di desa ini. Namun banyak sekali rumah yang hancur karena gempa, sebab dekat dengan sumber gempa. Perempuan di desa ini umumnya tidak memiliki aset pribadi, karena semua aset didaftarkan atas nama suami.

Kapasitas Desa Tanjung Padang secara keseluruhan memperoleh nilai 66 dengan kapasitas sedang yang masuk ke dalam kategori desa Tangguh Bencana Madya. Desa ini memiliki akses layanan dasar yang baik, sistem komunikasi memanfaatkan TOA, *handy talky* dan lainnya. Desa ini juga mengadakan pelatihan ekonomi kreatif dan lainnya.

Sistem penanggulangan di desa Tanjung Padang sudah baik, karena desa ini memiliki KPBD (kelompok Penanggulangan Bencana Desa) walau anggarannya baru tahap usulan. Kesi-apsiagaan desa masih minim karena tidak memiliki sistem peringatan dini dan juga latihan

evakuasi mandiri jarang dilakukan dan tidak melibatkan banyak orang.

Kapasitas Desa Tanjung Padang masih tergolong sedang, akses layanan dasar tidak sensitif gender dalam melakukan tindakan PRB pun desa ini masih masuk ke dalam katagori bias atau netral gender. Olehkarenanya, nilai risiko bencana Desa Tanjung Padang bernilai tinggi.

Desa Mataue memiliki nilai kerentanan sedang sebesar 1,91. Keren-tanan sosial Desa Mataue memiliki nilai yang rendah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat desa ini sangat baik.

Kerentanan ekonomi Desa Mataue termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh matapencaharian sebagian besar adalah petani, lahan mereka sebagian rusak akibat gempa yang menurunkan produksi. Perem-puan hanya sebagai tenaga tambahan dalam mencari nafkah.

Kerentanan fisik Desa Mataue termasuk kedalam kategori sedang dikarenakan tidak banyak fasilitas umum dibangun di desa ini. Desa ini memiliki rumah adat yang bernama Lobo, sebagian konstruksinya berbahan kayu, pengetahuan lokal mengenai konstruksi bangunan ini perlu diadopsi kembali sebagai upaya mengurangi kerentanan fisik

Nilai keseluruhan dari perangkat penilaian ketangguhan desa adalah 68. Hal ini menandakan bahwa Desa Mataue masuk kedalam kategori desa Tangguh Bencana Madya. Penanggu-lation bencana di Desa Mataue sudah responsif gender. Warga Desa Mataue memiliki keterbukaan dan ruang diskusi melalui lembaga adat yang disebut Tina Ngata. Desa ini juga memiliki pengelolaan risiko

bencana seperti penanaman bambu dan beringin untuk menghalau longsor.

Desa Mataue sudah memiliki sistem peringatan dini dengan memanfaatkan TOA, handphone dan obrolan grup sosial media. Terdapat pula tanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi. Peta evakuasi pun sudah dibuat namun belum disahkan. Meskipun demikian, risiko bencana di Desa Mataue bernilai tinggi. Hal ini dikarenakan Desa Mataue memiliki ancaman bencana yang sangat tinggi dengan kerentanan yang tinggi pula.

Desa Lonca memiliki total nilai kerentanan sebesar 2,03 yang dapat dimasukkan ke dalam kategori kerenta-nan sedang. Kerentanan sosial Desa Lonca dikategorikan sedang, perem-puan di desa ini cukup aktif karena terlibat dalam kelembagaan desa yang disebut Tina Ngata

Kerentanan ekonomi Desa Lonca masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh sebagian warganya yang memiliki matapencaharian seba-gai petani yang turun penghasilannya setelah gempa karena ladangnya yang rusak. Kelompok perempuan baru dibuat setelah gempa untuk mening-kan pendapatan keluarga

Kerentanan fisik Desa Lonca masuk ke dalam kategori sedang. Tidak banyak fasilitas yang dibangun di daerah ini. Sebanyak 46,67% warga yang disurvei telah tinggal di rumah yang telah diperbaiki secara pribadi sebab kerusakannya ringan sampai sedang.

Nilai keseluruhan dari perangkat penilaian ketangguhan desa adalah 89. Hal ini menandakan bahwa Desa Mataue masuk kedalam kategori desa Tangguh Bencana Utama. Akses

layanan dasar di Desa Lonca tergolong terjangkau. Layanan informasi tersedia, namun sayangnya perempuan/istri jauh lebih sedikit mendapat akses informasi.

Desa ini memiliki peraturan penangu-langan bencana, walau belum disahkan dalam peraturan desa. Desa ini juga memiliki kesepakatan dengan desa Boladanko dan Winatu untuk mengatasi longsor. Desa Lonca mampu mendeteksi kemungkinan terjadi bencana melalui pengetahuan lokal yang dimiliki oleh tetua adat. Nilai kapasitas yang tinggi didapat karena peran pemimpin lokal atau ketua adat yang kebijakannya sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Menjadikan nilai risiko bencana Desa Lonca bernilai sedang.

Kelurahan Balaroa memiliki total nilai kerentanan 2,45 yang dapat dima-sukkan ke dalam kategori kerentanan tinggi. Hasil ini diperoleh dari kalkulasi nilai kerentanan fisik yang tinggi, kerentanan sosial yang sedang dan nilai kerentanan ekonomi yang tinggi. Kerentanan sosial Kelurahan Balaroa dikategorikan tinggi, karena kepadatan penduduknya yang cukup tinggi mengakibatkan permasalahan sosial yang begitu banyak terjadi di Balaroa.

Kerentanan ekonomi kelurahan Balaroa tergolong sedang, hal ini dikarenakan sebagian besar matapencarian warga Kelurahan Balaroa adalah sebagai pedagang dan pegawai. Para pedagang perempuan kehilangan aset, tempat, modal dan konsumen karena terkena likuefaksi.

Kerentanan fisik Kelurahan Balaroa masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya bangunan sara-na dan prasarana serta rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa dan likuefaksi.

Nilai keseluruhan dari perangkat penilaian ketangguhan Kelurahan Balaroa adalah 55, nilai ini menanda-kan Kelurahan Balaroa masuk kedalam kategori Kelurahan Tangguh Pratama. Akses layanan dasar di Kelurahan Balaroa sangat terjangkau dan kondisinya baik. Layanan informasi tersedia dan lancar. Sayangnya akses, partisipasi perempuan pasca bencana tidak terlihat pada fasilitas layanan dasar huntara yang tidak responsif gender. Kelurahan Balaroa tidak memiliki kesiapsiagaan untuk pemuli-han yang baik, belum ada mekanisme dan upaya pemulihan serta tersedianya pemulihan yang berkelanjutan

Kelurahan Balaroa ini memiliki risiko bencana yang tinggi karena Kelurahan Balaroa memiliki kerenta-nan fisik dan sosial yang tinggi dengan kapasitas yang rendah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dari empat indikator akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dari kebijakan dan program penanggulangan bencana masih bias gender, dimana terdapat ketidakberpi-hakan aktivitas/kegiatan atau kondisi/ keadaan untuk mendu-kung pelaksanaan peran gender.

| Matriks Risiko | V/C    |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
|                | Tinggi | Sedang | Rendah |

|         |        |            |                                    |                                 |
|---------|--------|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Ancaman | Rendah |            |                                    |                                 |
|         | Sedang |            |                                    |                                 |
|         | Tinggi | Desa Lonca | Desa Mataue<br>Desa Tanjung Padang | Desa Tompe<br>Kelurahan Balaroa |

Tabel 2. Matriks penilaian risiko bencana Desa Tompe, Tanjung Padang, Mataue, Lonca dan Kelurahan Balaroa

Penanggulangan bencana yang reponsif gender akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi nilai kapasitas suatu desa, semakin besar pula keterlibatan perempuan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dibuktikan pada desa-desa yang berada di pegunungan seperti Desa Mataue dan Desa Lonca yang masih memegang teguh adat dan memper-timbangkan suara perempuan dalam segala bentuk pengambilan keputusan. Pelestarian pengetahuan lokal sangat berpengaruh terhadap nilai risiko bencana, beberapa desa yang memiliki pengetahuan lokal dan melestarikannya memperoleh nilai kapasitas yang lebih tinggi.

Desa-desa di wilayah pegunungan, seperti di Mataue dan Lonca, pengeta-huan lokal masih menjadi panduan warga, pemimpin adat dan tokoh adat masih menjadi referensi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, walau ada kelembagaan di tingkat desa, tetapi lembaga adat dan desa dapat berjalan beriringan. Pengetahuan awal tentang wilayah dan bencana di masa lalu, dapat dijadikan langkah awal untuk menyusun kebijakan atau peraturan desa, atau kesepakatan bersama dalam lingkup yang terbatas, misalnya di desa. Desa satu dengan yang lainnya membutuhkan kerjasama strategis, merancang upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Kehadiran LSM, sangat berkontri-busi banyak dalam menghidupkan dinamika yang ada di desa, gagasan baru bermunculan, termasuk ide untuk menghidupkan beberapa sendi ekonomi seperti pasar yang sempat mati suri di beberapa daerah pasca bencana.

Perencanaan di tingkat provinsi belum sepenuhnya cocok dengan apa yang dilakukan di tingkat desa. Provinsi Sulawesi Tengah tentu mengharapkan adanya percepatan ekonomi untuk menopang kebutuhan pembangunan wilayahnya, apalagi bencana mengaki-batkan perlambatan ekonomi. Sehing-ga wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, dapat menyumbang untuk kebutuhan pemba-ngunan daerah. Walau saat ini Sulawesi Tengah hanya bergantung dari industri tambang, tetapi ke depan diharapkan wilayah ini dapat menjadi wilayah penyangga untuk kebutuhan ibu kota baru. Menjadi wilayah penyangga ibu kota, merupakan kesempatan baik yang harus diambil, untuk itu dibutuhkan strategi dan arahan yang jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat serta diikuti dengan peraturan daerah yag memadai agar dapat tercapai apa yang diinginkan.

Strategi mitigasi bencana, secara struktural, yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah sekedar membangun tanggul sepanjang 7.2 km di area pantai Talise, strategi lainnya



seperti melengkapi berbagai peralatan peringatan dini, masih belum ada. Begitu juga dengan mitigasi nonstruktural, juga belum terlihat, peraturan daerah pasca bencana yang memper-timbangkan potensi bencana masih belum terealisasi, misalnya peraturan daerah tentang tata ruang, yang sampai saat ini masih belum selesai. Upaya membangun kesadaran masyarakat secara masif pun belum banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara di tingkat desa, upaya mitigasi struktural sudah mulai diinisiasi, walau secara sederhana, tetapi upaya-upaya tersebut telah dilakukan, misalnya, dengan menye-diakan TOA sebagai sarana untuk peringatan dini. Mitigasi nonstruktural, juga dilakukan, dengan membuat peraturan berbasis desa, memulai membangun kesepakatan antar desa untuk penyediaan ruang evakuasi, seperti Desa Tompe, Tanjung Padang dengan Desa Sibado.

Kebijakan pemerintah di tingkat provinsi dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat disimpulkan masih rendah. Pengalaman gempa serta berbagai peristiwa bencana yang dialami oleh wilayah-wilayah di Sulawesi Tengah, belum menghasilkan berbagai kebijakan yang lebih sensitif terhadap bencana, karena dibutuhkan anggota DPRD yang juga sensitif terhadap isu kebencanaan.

Memahami jenis kerentanan yang berbeda di antara perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam suatu komunitas menjadi faktor penentu dalam konteks pengurangan risiko bencana yang bertujuan untuk melindungi mereka

yang terdam-pak. Akar penyebab kerentanan gender dalam masyarakat dikarenakan perem-puan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap kekuasaan, struktur, serta sumber daya dan budaya patriarki yang menciptakan dominasi laki-laki dalam berbagai sektor. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat patriarkal dirugikan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan kepala keluarga perempuan atau penyandang disabilitas mengalami kondisi yang lebih buruk lagi.

Lemahnya kelembagaan pengarus-utamaan gender sering menyebabkan kurangnya atau tidak adanya tindakan-tindakan strategis yang penting dilakukan untuk memastikan isu-isu gender terintegrasi dalam kebijakan dan program pengurangan risiko bencana. Pengarusutamaan gender dalam pengurangan risiko bencana mengacu pada upaya-upaya mempromosikan kesetaraan gender, dengan memasuk-kan analisis gender baik dalam pengurangan risiko dan menentukan strategi pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi kerentanan.

Salah satu kebijakan untuk menjembatani persoalan gender dalam penanggulangan bencana, sesuai dengan Perka Nomor 13 tahun 2014, salah satu amanahnya adalah membentuk Pokja Pengarus Utamaan Gender (Pokja PUG), Pokja ini merupakan kelompok kerja yang beranggotakan berbagai lembaga termasuk di dalamnya LSM yang bekerja untuk isu gender. Pokja PUG ini diinisiasi oleh BPBD, di tingkat nasional diinisiasi oleh BNPB. Tetapi dari temuan dan hasil wawancara, di

semua BPBD baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota belum membentuk Pokja PUG.

## **KESIMPULAN**

- Penanggulangan bencana yang responsif gender akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi nilai kapasitas suatu desa, semakin besar pula keterlibatan perempuan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dibuktikan dengan desa yang berada di daerah pegunungan, mereka memegang teguh adat dan mempertimbangkan suara perempuan dalam segala bentuk pengambilan keputusan.
- Perencanaan pembangunan di tingkat provinsi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dilakukan di tingkat desa. Penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya melibatkan aktif masyarakat dan perwakilan gender.
- Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana masih lemah. Pengalaman mengha-dapi bencana belum menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap pengurangan risiko bencana dan perspektif terhadap gender.
- Pelestarian pengetahuan lokal sangat berpengaruh terhadap nilai risiko bencana, beberapa desa yang memiliki pengetahuan lokal dan melestarikannya memperoleh nilai kapasitas yang lebih tinggi. Pengetahuan awal mengenai wilayah dan bencana di masa lalu dapat dijadikan referensi awal dalam menyusun kebijakan untuk pengurangan risiko bencana.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Care Peduli yang telah mendukung pendanaan untuk menja-lankan penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abendanon, E.C., (1917): Expedition de la celebres centrale - Voyages geologiques et geographiques a travers la celebres centrale (1909-1910). Librairie et Imprimerie ci-devant E. J. Brill, Leyde.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala. Kecamatan Sirenja Dalam Angka 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi. Kecamatan Kulawi Dalam Angka 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Palu. Kecamatan Palu Barat Dalam Angka 2019.
- Bellier, O., Beaudouin, T., Sebrier, M., Villeneuve, M., Bahar, I., Putranto, E., Pratomo, I., Massault, M., dan Seward, D., (1997a): Active Faulting in Central Sulawesi (Eastern Indonesia) a geological approach, GEODYSEA Final Report.
- Bellier, O., Sebrier, M., Beaudouin, T., Villeneuve, M., Braucher, R., Bourles, D., Siame, L., Putranto, E., dan Pratomo, I., (2001): High slip rate for a low seismicity along the Palu-Koro active fault in central Sulawesi (Indonesia). Terr. Nova, 13: 463-470
- BNPB, (2014): Data dan Informasi Bencana Indonesia. Indonesian National Board for Disaster Management 202

- Fitch, T., (1972): Plate convergence, transcurrent faults, and internal deformation adjacent to southeast Asia and the western Pacific. *J. Geophys. Res.* , 77((23)): 4432-4462
- Horspool, N., Natawidjaja, D.H., Yulianto, E., Lawrie, S., dan Cummins, P., (2011): An Assessment on the use of High Resolution Digital Elevation Models for Mapping Active Faults in Indonesia, Natural Hazards Impact Project Risk and Impact Analysis Group Geoscience Australia.  
<https://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/disasters-and-climate-change/517-pengelolaan-bencana-berbasis-gender>  
<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>
- Innaqa Suci. Penilaian Risiko Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. 2017. Tesis. Fakultas Manajemen Pertahanan Program Studi Manajemen Bencana Untuk Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.
- Irsyam, M., Sengara, I.W., Aldiarnar, F., Widiyantoro, S., Triyoso, W., Kertapati, E., Natawidjaja, D.H., Meilano, I., Soehardjono, Asrurifak, dan Ridwan, M., (2010): Peta Zonasi Gempa Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum.
- Lettis, W.R., dan Kelson, K.I., (2000): Applying geochronology in paleoseismology. *Quaternary Geochronology: Methodes and Applications*: 479-495
- Murtakhamah. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.2, No.1, Juni 2013
- Nugroho Cahyo et all. 2018. Indeks Risiko Bencana Indonesia. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Paripurno E. Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). 2014. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia.
- Perangkat Penilaian Ketangguhan Desa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357: 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
- Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
- Public-Work-Team, (1999): Peta orientasi ruang geografis Provinsi Sulawesi Tengah., Proyek peningkatan pembinaan dan pengembangan informasi literal dan spasial tahun anggaran 1998/1999. Indonesian Public Work, Indonesia.
- Rohmaniyah Inayah. 2013. Gender, Androsentrisme Dan Sexisme Dalam Tafsir Agama. *Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.2, No.1
- Sarsito, D.A., (2010): Pemodelan Geometrik dan Kinematik Kawasan Sulawesi - Kalimantan Timur berdasarkan data GNSS-GPS dan gaya berat global, Institut Teknologi Bandung. 206
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

The United Nations International  
Strategy for Disaster Reduction  
(UNISDR), Terminologi of  
disaster risk reduction. 2009.

Undang Undang Nomor 24 Tahun  
2007 Tentang Penanggulangan  
Bencana

